

Bappebti Kembali Blokir 68 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin

Tanggal : Jum'at , 12 Februari 2021

Media : agrofarm.co.id

Halaman : 1

Wartawan : dian

Muatan Berita : Positif

Narasumber : Sidharta Utama, (Kepala Bappebti,), M. Syist (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti)

Rubrik : Industri

Topik : Blokir Domain Ilegal

#21612 (tanpa judul)
#21634 (tanpa judul)
#21641 (tanpa judul)
Home
Pedoman Media Siber
Profile
Redaksi
Stomag



INFORMASI AGRIBISNIS

Pertanian
Perkebunan
Sawit
Kelautan
Industri
Keuangan
Kehutanan
Inovasi
Inspirasi
Ngobras
Redaksi
Profile

BREAKING NEWS

Menteri Trenggono Ajak Denmark Garap Lumbung Ikan Nasional Maluku



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Departemen Perdagangan Republik Indonesia

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)ist

BAPPEBTI KEMBALI BLOKIR 68 SITUS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANPA IZIN

AgroFarm.co.id Mengawali tahun 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memblokir 68 domain situs entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Pemblokiran ini bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia. Pada 2020, Bappebti telah memblokir sebanyak 1911 domain situs.

"Tahun 2021, Bappebti akan semakin meningkatkan pengamatan dan pengawasan terhadap aktivitas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat dari investasi perdagangan berjangka komoditi tak benar yang berpotensi merugikan, serta memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi," ujar Kepala Bappebti, Sidharta Utama dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2021).

Sidharta menegaskan, domain situs yang diblokir pada Januari 2021 ini masih didominasi oleh situs-situs internet piang berjangka dari luar negeri. Penting diketahui, meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka. Misalnya, melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist menjelaskan, Bappebti melakukan pembatasan agar situs-situs internet tersebut tidak dapat diakses di Indonesia. Piang berjangka ini biasanya menggunakan introducing broker sebagai perwakilan di Indonesia.

"Mereka dengan percaya diri menawarkan kontrak berjangka komoditi, forex, dan index di Indonesia dengan dalih telah mendapat legalitas dari regulator dimana perusahaan tersebut berasal. Tentu ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi merugikan masyarakat," imbuh Syist.

Syist menambahkan, selain domain situs piang berjangka luar negeri, terdapat juga domain situs dari entitas yang melakukan kegiatan opsi biner (binary options). Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Opsi dalam konteks yang ditawarkan oleh broker kepada trader/investor melalui opsi biner hanya sebatas memilih prediksi harga naik atau harga turun. Hal ini didasarkan pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan profit atau sebaliknya trader/investor mengalami kerugian.

Selhingga mekanisme yang dilakukan melalui opsi biner tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang berlaku di Indonesia.

Mengingat opsi biner yang beredar di tengah masyarakat saat ini tidak memiliki legalitas dari regulator di Indonesia, maka apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah saat mediasi, jelas Syist.

Selain itu, penyedia aplikasi opsi biner tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, jadi, apabila masyarakat merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan antara nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, masyarakat diharapkan agar selalu mempelajari tentang latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, dan kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan. Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka komoditi juga harus terlebih dahulu harus mengetahui wakil piang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan resiko yang dihadapi, serta tidak mudah terguyur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran.

"Jangan mudah terguyur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran. Pastikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas perusahaan, dengan cara mengakses situs web: <https://www.bappebti.go.id/>," kata Syist. Dian



SHARE

MAJALAH AGROFARM



TERKINI

- 
Bappebti Kembali Blokir 68 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin
@ 12 Februari, 2021
- 
Dorong Pemulihan Ekonomi, Mendag Genjot Ekspor Nonmigas
@ 12 Februari, 2021
- 
Menteri Trenggono Ajak Denmark Garap Lumbung Ikan Nasional Maluku
@ 12 Februari, 2021
- 
Kementerian Komitmen Wujudkan Ketahanan Pangan di Forum CFS ke-47
@ 12 Februari, 2021
- 
Kementerian Kembangkan Jagung Rendah Aflatoxin
@ 12 Februari, 2021

SOSIAL MEDIA



INDUSTRI

- 
Bappebti Kembali Blokir 68 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin
@ 12 Februari, 2021
- 
Dorong Pemulihan Ekonomi, Mendag Genjot Ekspor Nonmigas
@ 12 Februari, 2021
- 
Kementerian Jaga Pasokan Bahan Baku Garam untuk Sektor Industri
@ 10 Februari, 2021
- 
Dukung Program PEN, Kementerian Optimalkan Anggaran Rp 2,87 Triliun
@ 8 Februari, 2021